

Tabel Analisa Open Coding (*categorizing*) pada Implementasi Perwali Nomor 89 tahun 2011 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung

No	Hasil Wawancara/ Data	Kategori	Properti /sifat	Ukuran/intensitas
1	<p>Informan : Kasubid Pengawasan dan penanaman modal BPMP Kota Bandar Lampung (Bapak Muhtadi Arsyad Temenggung)</p> <p>a. <i>“Sosialisasi terhadap pelaku usaha caranya kita lakukan pada saat dia melakukan izin, yang mensosialisasikan ya kami pihak dari BPMP bagian penanaman modal terus pada saat ada event pada saat orang nanya ya kita jelasin juga Kendala adanya Ya kadang gini pas awal awal si ya kalau skrg gak lg si, pemahaman mereka dengan perwali sudah meningkat ,kita juga Informasikan lewat internet “</i></p> <p>b. <i>“Ya banyak gini pas awal awal ada perwali ya kalau skrg gak lg si, pemahaman mereka dengan perwali belum paham betul. Kita juga Informasikan lewat internet tapi tidak resmi si tidak menggunakan web nya BPMP”</i></p> <p>c. <i>“Perwali tentang minimarket ini sejak tahun 2009 telah mengalami tiga kali perubahan, pertama perwali Nomor 17 tahun 2009 kemudian Nomor 89 tahun 2011 dan Nomor 11 tahun 2012”</i></p>	Sosialisasi izin usaha	a.Proses sosialisasi (dapat memahami perwali, dapat mengurangi pelanggaran perwali),waktu sosialisasi, media sosialisasi, metode, aktor.	a. Tinggi

2	<p>Informan :Pengusaha minimarket (Bapak Ramli Rasmil)</p> <p>a. <i>“koordinasi pihak pengusaha minimarket dengan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan kebijakan ini hanya terjadi apabila kami ingin mengurus surat izin dikantor BPMP Kota Bandar Lampung, disana mereka memberitahukan bahwa ada peraturan baru bagi minimarket dan kami harus mengikuti peraturan tersebut. “</i></p> <p>b. <i>“Informasi yang didapat sudah jelas karena ada drafnya dan disana dijelaskan oleh BPMP”</i></p>	Koordinasi	Tupoksi masing-masing instansi, komunikasi, bekerjasama,	Rendah
3	<p>Informan :Kabid Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Kota Bandar Lampung (Bapak Muherwan SE),</p> <p><i>“ dalam melaksanakan perwali No 89 Tahun 2011 tentang penataan dan persyaratan minimarket , distako bekerjasama dengan beberapa instansi terutama BPMP. Minimarket yang telah direkomendasikan untuk dibangun kemudian dirapatkan lagi dengan tim teknis apakah minimarket tersebut layak diberi izin usaha tau tidak”</i></p>	Koordinasi	Tupoksi masing-masing instansi,komunikasi, bekerjasama.	Tinggi
4	<p>Informan : Kasi Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, (Bapak Agustam)</p> <p><i>“hubungan pol pp dalam berkoordinasi melaksanakan kebijakan terkait minimarket ini yaitu ketika minimarket melakukan pelanggaran</i></p>	Koordinasi	Tupoksi masing-masing instansi, komunikasi, bekerjasama.	Tinggi

	<i>maka akan ditutup paksa misal melanggar persyaratan dan penataan minimarket, lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan maksimal empat unit dalam radius seratus kilometer dan lain sebagainya”</i>			
5	<p>Kabid lalu Lintas dan angkutan jalan Kota Bandar Lampung(Bapak Iskandar Zulkarnain)</p> <p><i>“pada saat rapat dengan tim teknis terkait kebijakan minimarket,BPMP memberikan usul lokasi pendirian minimarket apakah layak untuk dibangun. Maksudnya, pembangunan minimarket ini akan menimbulkan kemacetan di jalan atau tidak . misalnya pendirian minimarket dari tikungan jalan sejauh 50 meter”</i></p>	Koordinasi	Tupoksi masing-masing instansi,komunikasi, bekerjasama.	Tinggi
6	<p>Kasubbag Perundang-undangan bagian hukum (Bapak Irianyanto)</p> <p><i>“dalam rapat-rapat tim teknis dengan BPMP, bagian hukum diberikan kesempatan untuk membahas izin usaha pasar modern. apakah layak untuk dikeluarkan atau tidak”</i></p>	Koordinasi	Tupoksi masing-masing instansi, komunikasi, bekerjasama	Tinggi
7	Melakukan fasilitasi yang dilakukan setahun sekali	Koordinasi	Komunikasi antar instansi	Tinggi

8	<p>a. Kasubid Pengawasan dan penanaman modal BPMP Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Muhtadi Arsyad Temenggung,</p> <p><i>“ staf yang ada sekarang sudah cukup, karena sudah ada Kepala Badan, Sekretaris, Bidang Penanaman Modal, Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Bidang Perizinan, Bidang Informasi dan Pengaduan beserta sub bagiannya”</i></p> <p>b. Pegawai BPMP Golongan II berjumlah 11 (12,36%), golongan III berjumlah 71 (79,77%) golongan IV 7 orang (7,87%). Tingkat pendidikan Pegawai, SLTA /Sederajat jumlah 24 orang (26,97%), , D-III jumlah 4 orang (4,49%), S1 51 (57,30%), S2 jumlah 10 orang (11,24%).</p> <p>c. Pegawai Bagian Hukum Golongan II berjumlah 2 (13,33%), golongan III berjumlah 11 (73,33%), golongan IV 2 (13,33%) golongan IV 7 orang (7,87%). Tingkat pendidikan Pegawai, SLTA /Sederajat jumlah 3 orang(20%) , S1 7 orang (50%). S2 5 orang (30%)</p> <p>d. Pegawai Distako Golongan 2 1 orang (1,56%), golongan III 5 orang (7,81%), golongan IV 15 orang (23,43%) dan Non Eselon 43 orang (67,18%)</p> <p>e. Pegawai Dinas Perhubungan, Pendidikan S2 2 orang (1,30%), S1 31 orang (20,26%), Sarjana muda 4 orang (2,61), SLTA 111 orang (72,54 %), SLTP 2 orang (1,30%), SD 3 orang (1,96%)</p>	SDM	Kebutuhan, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, sikap	Tinggi
---	--	-----	--	--------

	f. PNS di Sat Pol PP berjumlah 225 orang dan pegawai honorer 487 orang. Keseluruhanya wajib mnegikuti Pelatihan dasr Polisi Pamong Praja			
9	Komputer, Laptop, printer, Meja Kasubid, Meja Staf, kursi putar, kursi besi, lemari kayu, lemari box, mobil keliling, server Sms center,	Fasilitas	Kelengkapan sarana dan prasarana (penunjang proses perizinan)	Tinggi
10	Informan :Kabid Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Kota Bandar Lampung (Bapak Muherwan SE), <i>“Kami bergantung terhadap data dari BPMP dan hasil rapat dari tim untuk melakukan action lapangan terkait menjamurnya pasar modern. anggaran penertiban memang berada di distako namun untuk tindaklanjut pelaksanaan penertiban bergantung terhadap data BPMP dan hasil rapat koordinasi tim penertiban. “Bulan ini bisa saja tapi datanya mana,”</i>	Disposisi	Tindakan yang dilakukan	Rendah
11	Informan : Kasubag Pengawasan dan Penanaman Modal BPMP Kot Bandar Lampung, (Muhtadi Arsyad Temenggung) <i>“ jika semua minimarket yang melanggar perwali tentang minimarket ditutup semua, maka akan mempengaruhi investasi di Bandar Lampung karena minimarket yang lokasinya tidak sesuai dengan perwali jumlahnya tidak sedikit. Iklim investasi akan menjadi buruk tetapi penataan itu tetap dilakukan jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang harus</i>	Disposisi	Meningkatkan PAD, kondisi ekonomi kota Bandar Lampung, layanan infrastruktur public,	Rendah

	<p><i>memperhatikan kepentingan, dalam artian kata kepentingan dalam bentuk investasi. Mereka membayar retribusi dan tenaga kerja mereka juga dari tenaga kerja local, ibaratnya ada untung ruginya juga kalau kita harus menerapkan kebijakan aturan sebenarnya sedangkan ada hal atau pihak yang dikorbankan. Kalau secara hukum memang harus ditaati tetapi harus melihat lihat beberapa aspek yang akan mempengaruhi dampak dari kebijakan tersebut”</i></p>			
12	<p>Informan : Kasubbag perundang-undangan bagian hukum sekretariat Kota Bandar Lampung bahwa yaitu (Bapak Irianyanto, SH)</p> <p><i>“dalam rapat-rapat tim teknis terkadang terjadi perbedaan pendapat, aturan sudah jelas terdapat dalam perwali, tapi mereka (BPMP) tetap melanggar. Kita bagian hukum tidak mau macem-macam, semua sudah sesuai dengan aturan. Saya menjelaskan tentang peraturan ini yang ada tetapi mereka (BPMP) tidak sependapat atau tidak senang karena mereka menginginkan izin usaha harus keluar. Saya hanya berpatokan terhadap peraturan yang ada, tetapi pihak perizinan berpatokan PAD harus masuk, ya kita tidak bisa bertindak karena kawan, ya tau sendiri lah”</i></p>	Disposisi	Tindakan yang dilakukan	Rendah

10	<p>Kasubid Pengkajian dan Pengembangan Modal (Ibu Sri Yuwiati)</p> <p>a. <i>“Dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan Kantor BPMP Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mengeluarkan berbagai macam surat-surat baik itu izin maupun keterangan. Jenis-jenis pelayanan yang dikeluarkan oleh kantor ini yaitu Keterangan Rencana Kota (K RK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Daftar Industri (IDI), Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Kepariwisata n (SIUK), Surat izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Surat Izin Usaha Angkutan, Pengesahan Akte Pendirian Koperasi, Izin Peletakan Titik Reklame”</i></p>	Fungsi pelayanan	Jenis	Tinggi
11	<p>a. Pengusaha minimarket (Bapak Remli Rasmil)</p> <p><i>“Perusahaan kami hadir di Bandar Lampung sejak Tahun 2005, dan hingga kini perusahaan kami telah memiliki banyak gerai di Bandar Lampung. Selama waktu tersebut secara umum dari tahun ketahun telah ada perbaikan dalam pelayanan perizinan.</i></p>	Kualitas pelayananan	Prosedur pelayanan, kemampuan pegawai, kesopanan dan keramahan pegawai, Peningkatan waktu pelayanan, keamanan pelayanan dan peningkatan sarana	Tinggi

	<p>Kasubid Pengkajian dan Pengembangan Modal (Ibu Sri Yuwiati)</p> <p>b. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Untuk itu, BPMP melakukan hal-hal sebagai berikut, Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai Jenis, Prosedur dan mekanisme Pelayanan Perizinan Menggunakan seragam khusus yang disahkan sebagai Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 58 Tahun 2008, Membuat ruang pelayanan perizinan dengan tingkat kenyamanan seoptimal mungkin dengan anggaran yang ada, Membuat loket pengaduan masyarakat, sebagai salah satu instrumen koreksi kinerja BPMP dalam melakukan pelayanan.</p>			
12	<p>Informan : Kasubid Pengawasan dan penanaman modal BPMP Kota Bandar Lampung (Bapak Muhtadi Arsyad Temenggung)</p> <p>a. <i>“perizinan ada dua macam yaitu perizinan secara teknis dan administratif yang semuanya sudah tertuang dalam SOP, perizinan teknis misalnya lokasi harus sesuai dengan perwali”</i></p> <p>b. <i>“ Untuk penerbitan SIUP dan SITU pertama BPMP mensurvei lokasi. Apakah lokasi yang diajukan pengusaha minimarket itu memungkinkan untuk dibangun. Lokasi tentunya harus sesuai dengan Perwali Nomor 89 Tahun 2011. Selanjutnya hasil survei kami bahas dalam rapat tim teknis yang terdiri dari</i></p>	Perizinan	Kejelasan, kepastian waktu, tanggung jawab, kemudahan akses informasi, keramahan dan kenyamanan.	Tinggi

	<p><i>Disperhub, Distako, SatpolPP, Bagian Hukum Sekretariat pemerintah kota. Dalam rapat tersebut akan disetujui atau ada masukan untuk pengusaha minimarket untuk memperbaiki lokasinya maka mereka harus memperbaiki. Setelah tim teknis menyetujui lokasi tersebut kemudian tim teknis mengajukan nota dinas ke Walikota Bandar Lampung untuk meminta persetujuan. Jika persetujuan diberikan Walikota maka surat perizinannya bisa diterbitkan. Selain koordinasi mengenai penerbitan surat izin, kordinasi juga dilakukan untuk penertiban minimarket yang melanggar dengan memberikan peringatan tertulis kepada pengusaha”</i></p>			
14	<p>Informan : Kasubid Pengkajian dan Pengembangan Modal, (Ibu Sri Yuwiati)</p> <p><i>“ kewajiban setiap pengusaha minimarket yaitu membayar retribusi kepada pemerintah. Untuk retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Pasar Moden (SIUP-PM) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ini merupakan investasi PAD. Jadi hal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak menutup semua minimarket yang melanggar”</i></p>	Retribusi	Aliran retribusi, jumlah retribusi pertahun, imbalan untuk pengusaha, melayani pembayar dengan tepat, mengumpulkan hasil pembayaran dengan baik, mendata siapa yang wajib membayar atau tidak membayar retribusi, prosedur pemungutan, sanksi yang tegas, pengawasan pemungutan	Rendah

15	<p>Informan : Kasubbag perundang-undangan bagian hukum sekretariat Kota Bandar Lampung bahwa yaitu (Bapak Irianyanto, SH)</p> <p><i>“dalam rapat-rapat tim teknis terkadang terjadi perbedaan pendapat, aturan sudah jelas terdapat dalam perwali, tapi mereka (BPMP) tetap melanggar. Kita bagian hokum tidak mau macem-macem, semua sudah sesuai dengan aturan. Saya menjelaskan tentang peraturan ini yang ada tetapi mereka (BPMP) tidak sependapat atau tidak senang karena mereka menginginkan izin usaha harus keluar. Saya hanya berpatokan terhadap peraturan yang ada, tetapi pihak perizinan berpatokan PAD harus masuk, ya kita tidak bisa bertindak karena kawan, ya tau sendiri lah”</i></p>	Perbedaan pendapat	Cara mengatasi	Rendah
16	<p>Struktur Birokrasi : Kepala Badan, Sekreteriat (Sub Bag Penyusunan Program, monitoring & evaluasi, Sub Bagi Adm Umum dan Kepegawaian, Sub Bag Keuangan), Bid. Penanaman Modal (Sub. Bid pengkajian dan pengembangan penanaman modal, Sub Bid Pengawasan Penanaman Modal), Bid. Perencanaan dan Pengawasan (Sub Bid Perencanaan Pengembangan Perizinan, Sub Bid Pengawasan Pelayanan Perizinan), Bid. Perizinan (Sub Bid Pendaftaran & Pemrosesan perizinan, Sub Bid Penetapan & Penertiban Perizinan), Bid Informasi dan Pengaduan (Sub Bid Informasi dan Publikasi Perizinan, Sub Bid Pengaduan Perizinan), UNIT PELAKSANA TEKNIS</p>	Struktur birokrasi	Spesialisasi, rantai komando, rentang kendali	Tinggi

17	<p>Informan : Ibu rumah tangga yaitu ibu Winda yang beralamat di Perum BKP,</p> <p><i>“kalau saat ini lebih seneng di minimarket karena anaknya banyak tapi kalau gak bawa anak ya seneng di pasar tradisional. Alasannya ya karena lebih murah banyak pilihan dan bisa ditawar”</i></p>	Pilihan berbelanja	Kepuasan (kondisi tempat belanja, kelengkapan barang, ketersediaan dana, keramahan penjual, hadiah)	Tinggi
18	<p>Informan : Ibu Mira (bekerja di salah satu Perguruan Tinggi swasta di Kota Bandar Lampung,</p> <p><i>“kalau saya lebih seneng belanja di minimarket mbak, soalnya kan saya ngajar dari pagi sampe sore jam 3an , mana sempet kepasar, kalau di minimarket kayak surya itu kan praktis semuanya ada gak pake muter-muter dah bisa beli apa aja sayur, kebutuhan sehari-hari ada, tapi kalau minggu libur ya enak belanja di pasar”</i></p>	Pilihan tempat belanja	Kepuasan (kondisi tempat belanja, kelengkapan barang, ketersediaan dana, keramahan penjual, hadiah)	Tinggi
19	<p>Informan : Ibu rumah tangga yaitu ibu Winda yang beralamat di Perum BKP</p> <p><i>“ya kalau di minimarket saya seringnya beli susu mbak, karena anak saya kecil-kecil masih nyusu,disana kan biasanya lebih murah kadang dapet hadiah juga, kalau di toko biasa kan nggak, trus minyak goreng sama sabun-sabun gitu”</i></p>	Jenis Barang yang di beli	Barang primer, skunder dan tersier	Tinggi

20	<p>Informan : Ibu Mira (bekerja di salah satu Perguruan Tinggi swasta di Kota Bandar Lampung)</p> <p><i>“ ya biasa lah mbk, kalau saya belanja di minimarket itu biasanya yang jelas alat- alat mandi sabun, superpel,shampo, deterjen, minyak, nugget, kalau di pasar biasanya setok sayuran agak banyak, walaupun di minimarket ada paling bahan-bahan dikit-dikit yang kurang”</i></p>	Jenis Barang yang di beli	Barang primer, skunder dan tersier	Tinggi
----	---	---------------------------	------------------------------------	--------